

## Permintaan Dokumen Data Dukung Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan **Nomor : B.73/HK.00.01/03/2019**

perihal SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PANRB

**Nomor : B/69/PW.04/2019**

perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada 16 Ketua Pengadilan Negeri (terlampir) untuk memberikan data pendukung pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas :

1. Laporan MPZI Pengadilan Negeri
2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri unit kerja Pengadilan
3. Berita Acara Pelaksanaan PMPZI
4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM pada Pengadilan, dan
5. Laporan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dokumen-dokumen di atas akan menjadi dasar evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian dan batas akhir penyampaiannya adalah 13 Mei 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut :

- Permintaan Dokumen ZI : [https://www.ditjenmiltun.net/2019/633\\_SEK\\_OT01\\_1\\_5\\_2019.pdf](https://www.ditjenmiltun.net/2019/633_SEK_OT01_1_5_2019.pdf)

- SPPT-TI Aksi Pencegahan Korupsi : [https://www.ditjenmiltun.net/2019/B\\_73\\_HK00\\_01\\_03\\_2019.pdf](https://www.ditjenmiltun.net/2019/B_73_HK00_01_03_2019.pdf)
- Pembangunan ZI : [https://www.ditjenmiltun.net/2019/B69\\_PW04\\_2019.pdf](https://www.ditjenmiltun.net/2019/B69_PW04_2019.pdf)

Pengumuman ini dikutip dari [Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia](#)

(@x\_cisadane)